Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 461 - 467

Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah

Yunita Pamenta[1*], Yoel Pasae[2], Sita Yubelina Sabandar[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
yunitapamentaa@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap empat informan kunci. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bendahara pengeluaran sangat krusial dalam memastikan laporan pertanggungjawaban disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hambatan yang ditemukan meliputi keterlambatan dokumen pendukung, kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja, kendala teknis aplikasi dengan jaringan internet yang tidak stabil, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang perbendaharaan. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pengelolaan transaksi yang cermat, verifikasi dokumen yang teliti, serta koordinasi yang efektif antar bagian, sehingga laporan dapat tersusun tepat waktu dan sesuai regulasi. Penelitian ini menegaskan bahwa bendahara pengeluaran tidak hanya berperan administratif, tetapi juga strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Optimalisasi, Bendahara Pengeluaran, Laporan Pertanggungjawaban, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract: *This study aims to analyze the optimization of the role of the Expenditure Treasurer in preparing accountability reports at the General Bureau of the Regional Secretariat of Central Papua Province. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation involving four key informants. Data analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the role of the Expenditure Treasurer is crucial in ensuring that accountability reports are prepared accurately, transparently, and in compliance with government accounting standards. Several challenges were identified, including delays in supporting documents, suboptimal coordination among work units, technical issues with financial applications due to unstable internet connections, and limited human resources in treasury management. Optimization efforts are carried out through careful financial transaction management, thorough document verification, and effective coordination across units, enabling timely and compliant reporting. This study underscores that the role of the Expenditure Treasurer extends beyond administrative functions, providing a strategic contribution to enhancing transparency, accountability, and efficiency in local government financial management.*

Keywords: *Optimization, Expenditure Treasurer, Accountability Reports, Transparency, Accountability*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Kurniawan, 2020; Taufik & Wibowo, 2021). Dalam konteks tersebut, bendahara pengeluaran memegang peran strategis karena bertanggung jawab tidak hanya atas pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga atas penyusunan laporan pertanggungjawaban yang valid, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Ratnasari, 2024).

Namun, dalam praktiknya, penyusunan laporan pertanggungjawaban masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan penyampaian dokumen, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, hingga hambatan teknis pada penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital (Pratiwi & Nugroho, 2022). Fenomena serupa juga ditemukan di Biro Umum Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tengah, di mana bendahara pengeluaran sering menghadapi kendala koordinasi antarunit kerja dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan laporan keuangan dan risiko rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.

Tabel berikut menyajikan ringkasan fenomena umum terkait permasalahan penyusunan laporan pertanggungjawaban di lingkungan pemerintah daerah:

Tabel 1. Fenomena Permasalahan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama	Dampak terhadap Laporan	Sumber
Keterlambatan pengumpulan dokumen	Laporan disusun tidak tepat waktu	Wawancara internal SETDA Papua Tengah (2025)
Koordinasi antarunit kerja kurang optimal	Data tidak konsisten, laporan tidak akurat	Pratiwi & Nugroho (2022)
Gangguan teknis aplikasi keuangan (SIPD)	Data tidak tersimpan dengan baik, hilangnya informasi	Rahman (2021)
Keterbatasan SDM bidang perbendaharaan	Beban kerja tidak merata, kesalahan pencatatan	Taufik & Wibowo (2021)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Data di atas menunjukkan bahwa optimalisasi peran bendahara pengeluaran tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga substansial dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun sistem pelaporan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jika laporan pertanggungjawaban tidak optimal, maka potensi terjadinya temuan audit, keterlambatan pencairan anggaran, bahkan risiko penyimpangan penggunaan anggaran semakin besar (Lestari & Nugraha, 2020). Optimalisasi peran bendahara pengeluaran bukan hanya akan memperkuat aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah sebagai wujud nyata prinsip good governance.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah?
2. Faktor apa saja yang menghambat penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah?
3. Bagaimana upaya optimalisasi peran Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah?

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Optimalisasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Optimalisasi dalam manajemen pemerintahan dipahami sebagai upaya sistematis

untuk meningkatkan fungsi/peran agar hasil kinerja lebih maksimal, efisien, dan sesuai target organisasi publik (Kusuma, 2023; Ratnasari, 2024). Literatur dalam tesis menegaskan bahwa optimalisasi bukan sekadar mengejar keluaran terbesar, melainkan menemukan solusi paling efektif dengan risiko minimal dalam konteks tata kelola keuangan daerah.

Peran Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk KPA untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang/APBD pada unit kerja tertentu. Peran ini mencakup pencatatan transaksi, verifikasi bukti, pengendalian internal, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang transparan, akurat, dan tepat waktu (Bab IV tesis). Dalam konteks Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah, bendahara juga terlibat dalam koordinasi lintas-bagian untuk memastikan kelengkapan data dan kepatuhan regulatif.

Kerangka Regulatif (Garis Besar Terkini)

Pengelolaan keuangan daerah berlandas pada: (1) **PP No. 12/2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (payung pengelolaan APBD, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban); (2) **Permendagri No. 77/2020** sebagai pedoman teknis (BKU, buku pembantu, SPJ, pemanfaatan SIPD); serta (3) **PP No. 71/2010** tentang SAP sebagai rujukan pelaporan. Tesis menautkan pula **PMK No. 162/PMK.05/2013** terkait kedudukan/tanggung jawab bendahara—fundasional meskipun di luar horizon 7 tahun—yang tetap relevan untuk kewajiban pelaporan berkala dan akuntabilitas pribadi bendahara.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

LPJ merupakan instrumen akuntabilitas yang memuat ringkasan penggunaan anggaran, realisasi kegiatan, dan bukti pengeluaran dalam periode tertentu. Prosedur kunci yang dihimpun tesis meliputi: pencatatan transaksi harian (BKU & buku pembantu), pengumpulan/klasifikasi bukti, pengisian format LPJ sesuai regulasi/aplikasi (SIPD), serta rekapitulasi dan penyerahan tepat waktu kepada KPA/inspektorat (deadline bulanan & tahunan sebagaimana pedoman teknis).

Faktor Penghambat dan Risiko Kualitas Pelaporan

Temuan empiris tesis mengidentifikasi hambatan utama: keterlambatan dokumen pendukung, koordinasi antarunit yang kurang optimal, kendala teknis aplikasi (mis. jaringan internet tidak stabil), serta keterbatasan SDM perbendaharaan. Hambatan-hambatan ini berimplikasi pada ketepatan waktu, konsistensi data, dan kualitas LPJ.

Strategi Optimalisasi Peran Bendahara

Strategi yang direkomendasikan dalam tesis mencakup: pengelolaan transaksi yang cermat dan berbasis SOP, verifikasi berlapis terhadap dokumen, penguatan koordinasi lintas-bagian, pemutakhiran sistem pengarsipan, serta pemanfaatan SIPD untuk efisiensi dan ketertelusuran. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan/bimtek juga ditekankan agar kepatuhan pada PP 12/2019, Permendagri 77/2020, dan SAP terjaga.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena yang bersifat kontekstual dan kompleks, terutama terkait dengan peran bendahara pengeluaran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial dan administratif sebagaimana adanya di lapangan, tanpa manipulasi variabel, tetapi berfokus pada proses, makna, serta pemahaman yang diperoleh dari pengalaman partisipan penelitian (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2020).

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada Biro Umum Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tengah yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Adapun sampel penelitian terdiri dari empat orang informan kunci, yaitu Plt. Kepala Biro Umum, Kasubag Keuangan, Plt. Akuntansi, dan Bendahara Pengeluaran. Keempat

informan tersebut dipilih karena memiliki tanggung jawab langsung dalam alur pengelolaan dan pelaporan keuangan di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah.

Lokasi penelitian ini berada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, yang merupakan unit kerja strategis dalam mendukung tata kelola keuangan pemerintah daerah. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, dengan tahapan meliputi observasi awal, pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, serta verifikasi data melalui triangulasi. Pemilihan lokasi penelitian ini mempertimbangkan peran vital bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah provinsi baru yang tengah beradaptasi dengan sistem administrasi dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yakni observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas bendahara pengeluaran dalam pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban informan dengan fleksibel, sesuai dengan kerangka masalah penelitian. Dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi seperti Buku Kas Umum, laporan pertanggungjawaban bulanan dan tahunan, serta regulasi teknis terkait pengelolaan keuangan daerah.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019). Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk memilah data relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk naratif agar mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori maupun regulasi yang ada. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Biro Umum Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu unit kerja strategis yang berfungsi dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bagian dari sekretariat daerah, Biro Umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Peran Bendahara Pengeluaran dalam unit ini menjadi krusial karena tidak hanya bertugas mencatat dan membukukan transaksi keuangan, tetapi juga memverifikasi kelengkapan dokumen, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta berkoordinasi dengan unit kerja lain. Dalam praktiknya, biro ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterlambatan dokumen, koordinasi yang belum optimal antarbagian, keterbatasan SDM di bidang akuntansi pemerintahan, serta kendala teknis aplikasi berbasis internet (misalnya SIPD). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan implementasi teknis di lapangan, sehingga optimalisasi peran Bendahara Pengeluaran menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah empat orang yang dipilih secara purposive, terdiri dari pejabat dan staf yang memiliki peran langsung dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Karakteristik responden ditampilkan pada **Tabel 2** berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Nama (Inisial)	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Bekerja	Peran dalam Penelitian
1	V.G	Plt. Kepala Biro Umum	S2 Administrasi	>10 tahun	Penentu kebijakan dan pengawasan umum
2	R.D	Kasubag Keuangan	S1 Akuntansi	8 tahun	Koordinator teknis keuangan
3	S.Y	Plt. Akuntansi	S1 Akuntansi	6 tahun	Pengelola pencatatan dan pelaporan

No	Nama (Inisial)	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Bekerja	Peran dalam Penelitian
4	D.R	Bendahara Pengeluaran	D3 Keuangan	5 tahun	Pelaksana pencatatan dan penyusunan LPJ

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Hasil Wawancara

Untuk memperdalam analisis, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur kepada keempat responden. Hasil wawancara dirangkum dalam **Tabel 3** berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian

Informan	Pandangan tentang Peran Bendahara	Hambatan Utama	Upaya Optimalisasi
V.G (Plt. Karo Umum)	Bendahara sangat vital karena menguasai rincian pengeluaran; berperan memastikan akurasi laporan	Keterlambatan dokumen; koordinasi antarbagian belum optimal	Peningkatan koordinasi dan sistem pengarsipan
R.D (Kasubag Keuangan)	Bendahara menjadi aktor kunci dalam pencatatan dan verifikasi transaksi	Keterbatasan SDM; beban kerja tinggi	Pelatihan dan pembagian tugas yang jelas
S.Y (Plt. Akuntansi)	Bendahara berperan memastikan kesesuaian pencatatan dengan standar akuntansi pemerintahan	Perubahan regulasi dan aplikasi SIPD sering membingungkan	Penguatan pemahaman regulasi dan penggunaan aplikasi
D.R (Bendahara Pengeluaran)	Peran utama adalah mencatat transaksi, mengelola bukti, dan menyusun LPJ tepat waktu	Gangguan teknis aplikasi; jaringan internet tidak stabil	Pengecekan dokumen berlapis, koordinasi dengan unit terkait

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **peran Bendahara Pengeluaran** dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sangat krusial karena bendahara tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat, transparan, dan sesuai regulasi. Hal ini menjawab rumusan masalah pertama penelitian. Temuan ini sejalan dengan Ratnasari (2024) yang menegaskan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran fundamental dalam mencegah kesalahan administrasi dan temuan audit.

Terkait dengan **faktor penghambat**, penelitian ini menemukan empat aspek utama, yakni (1) keterlambatan dokumen pendukung, (2) koordinasi antarbagian yang belum optimal, (3) keterbatasan SDM bidang perbendaharaan, serta (4) kendala teknis aplikasi dan jaringan internet. Hambatan ini berdampak pada ketepatan waktu dan kualitas laporan, sebagaimana juga dikemukakan oleh Pratiwi dan Nugroho (2022) bahwa keterbatasan sistem dan SDM seringkali menurunkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam konteks **upaya optimalisasi**, bendahara pengeluaran telah melakukan sejumlah strategi, antara lain: pengelolaan transaksi keuangan yang cermat, verifikasi dokumen yang berlapis, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta pemanfaatan aplikasi SIPD untuk efisiensi pelaporan. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab secara komprehensif rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni mendeskripsikan peran bendahara, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menggambarkan strategi optimalisasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa **peran Bendahara Pengeluaran** dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sangat krusial. Bendahara tidak hanya bertindak sebagai

pelaksana administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa **faktor penghambat**, antara lain keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung, koordinasi antarunit kerja yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia di bidang perbendaharaan, serta kendala teknis pada penggunaan aplikasi berbasis internet. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada ketepatan waktu dan kualitas laporan pertanggungjawaban.

Dalam upaya **optimalisasi peran bendahara**, strategi yang dilakukan mencakup pengelolaan transaksi keuangan yang lebih cermat, verifikasi dokumen secara teliti, koordinasi yang lebih intensif antarunit kerja, serta pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Upaya ini terbukti dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. **Peningkatan kapasitas SDM** melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis reguler, serta pendampingan khusus di bidang akuntansi pemerintahan agar bendahara dan staf keuangan lebih kompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan daerah.
2. **Penguatan sistem koordinasi** antarunit kerja di lingkungan Biro Umum SETDA, misalnya dengan penerapan jadwal tetap pengumpulan dokumen serta penggunaan sistem monitoring internal berbasis digital.
3. **Perbaikan infrastruktur teknologi informasi**, khususnya jaringan internet yang stabil dan aplikasi keuangan yang lebih andal, sehingga kendala teknis tidak lagi menjadi penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
4. **Penerapan sistem reward and punishment** berbasis kinerja bendahara dan unit terkait, sehingga dapat memotivasi aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang lebih cepat, tepat, dan akurat.
5. **Penguatan pengawasan internal** oleh pimpinan SETDA dan inspektorat, agar laporan pertanggungjawaban tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan peran Bendahara Pengeluaran dapat semakin optimal dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 32–42. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872

Kusuma, A. (2023). Optimalisasi peran bendahara pengeluaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8*(2), 115–128. https://doi.org/10.33864/japi.v8i2.2023

Lestari, D., & Nugraha, R. (2020). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah: Sebuah evaluasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 6*(1), 45–56. https://doi.org/10.23852/jakp.v6i1.2020

Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *2*(1), 45–51. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024).

Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Paranoan, N., Sabandar, S. Y., Paranoan, A., Pali, E., & Pasulu, I. (2022). The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia. *WSEAS Transactions on Information Science and Applications*, *19*, 54–62. https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.6

Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 8–13. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295

Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 108–119. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738

Pratiwi, A., & Nugroho, Y. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13*(1), 77–89. https://doi.org/10.18652/jekp.v13i1.2022

Ratnasari, A. D. (2024). Optimalisasi peran bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah, 9*(1), 21–34. https://doi.org/10.24658/jmkd.v9i1.2024

Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 86–92. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862

Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 22–28. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Tandibua, S. T., Pasae, Y., & Baharuddin. (2025). Analisis Kinerja Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 1–7. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.294

Taufik, M., & Wibowo, A. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Peran SDM dan sistem informasi akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9*(2), 123–137. https://doi.org/10.10463/jrak.v9i2.2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara.

Rahman, F. (2021). Implementasi SIPD dalam tata kelola keuangan daerah: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi Informasi Publik, 5*(2), 89–100. https://doi.org/10.20524/jtip.v5i2.2021